

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pemilihan yang diselenggarakan di Indonesia, memiliki peranan dari berbagai pihak. Penyelenggaraan pemilihan baik legislatif, eksekutif, dan pemilihan kepala daerah dapat berjalan tidak hanya berasal dari panitia penyelenggara pemilihan, namun terdapat peran besar masyarakat sebagai pemilik suara. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang ada di dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia. Partisipasi masyarakat yang besar juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan yang tinggi kepada penyelenggara pemilu dan pada akhirnya berdampak pula terhadap legitimasi pemerintah yang kuat.¹ Sistem demokrasi yang menekankan akan kedaulatan tertinggi berada di tangan masyarakat menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu cara mewujudkan demokrasi di Indonesia. Melewati pemilihan ini, masyarakat dapat menentukan arah tujuan kehidupan sosial negara dan bangsa melewati calon-calon wakil rakyat. Para politisi yang menempatkan diri sebagai calon dari wakil rakyat memiliki berbagai cara agar mendapatkan suara rakyat yang banyak. Pada saat masa-masa kampanye sebelum penyelenggaraan hari pemilihan, para politisi akan gencar menyerukan visi misi dan tujuannya kepada masyarakat. Masyarakat dalam masa kampanye dapat mencermati janji-janji kerja yang dibawa para politisi dalam upayanya meraih suara masyarakat. Selain berdasarkan visi misi dan tujuan dari yang politisi janjikan kepada masyarakat dalam masa kampanye, untuk lebih banyak mendapatkan simpati dan suara masyarakat

¹ Muhammad, Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansyah "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019". *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 2020: 253.

para politisi menerapkan berbagai strategi agar mendapatkan kemenangan.

Menurut Schroder yang dikutip oleh Pulungan, Rahmatunnisa, dan Herdiansah² mengemukakan strategi politik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu strategi *ofensif*, dimana letak fokus dari strategi ini ialah perluasan pasar dan menembus pasar. Dalam strategi meraih kemenangan dalam pemilihan umum, perluasan pasar dan menembus pasar bertujuan untuk membentuk sebuah basis kelompok pemilih baru di samping basis kelompok pemilih yang telah ada sebelumnya. Kampanye yang dilakukan oleh para politisi dengan membawa program-program unggulan yang dapat menyentuh hati masyarakat. Dalam hal ini pula, para politisi dapat memperluas pasar dengan menjaring berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar di dalam masyarakat. Kemudian strategi yang kedua ialah strategi *defensif* yang mempertahankan mayoritas pemilihannya. Strategi *defensif* tidak hanya dalam berusaha mempertahankan pemilihannya, namun terdapat jalan untuk melepas pemilihannya dikarenakan beberapa tujuan politisi ataupun partai politik baik untuk bergabung menjadi satu kesatuan dengan partai lain ataupun melihat peluang lain dalam upaya meraih kemenangan.

Kembali pada peranan berbagai pihak akan keberhasilan penyelenggara pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih menjadi salah satu faktor dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan menjadi salah satu faktor pula seorang politisi ataupun partai politik mendapatkan posisi dalam pemerintahan apabila mampu meraih suara rakyat yang tinggi. Melihat strategi politik yang diungkap oleh Schroder dan perkembangan zaman saat ini serta kebudayaan politik yang ada di Indonesia, politisi-politisi dan partai politik condong akan menggunakan cara *ofensif* dengan cara memperluas dan menembus pemilih dengan cara menggaet tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar di

² Ibid 256-257

dalam kehidupan masyarakat, yang seringkali tokoh-tokoh tersebut pula menjadi panutan dan berperan dalam membantu memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memiliki peran dan berdampak dan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial hingga ke bidang politik. Tindakan atau sikap para tokoh yang ada di dalam masyarakat kemudian ikut merambah ke dalam bidang politik. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kebudayaan politik yang berorientasi pada budaya politik afektif. Hal ini dikarenakan masyarakat terpengaruh akan kecenderungan emosi untuk melihat para aktor yang terkait dalam sistem politik. Budaya politik yang terjadi bersifat partisipan, dimana masyarakat telah memiliki kesadaran dan telah terlibat dalam proses pemilihan, sebagai akibat dari munculnya sikap saling percaya di dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi demokrasi dapat berkembang dengan baik.³

Dalam menjalankan strategi politik *ofensif*, para politisi kemudian berusaha menggandeng tokoh-tokoh penting yang ada di dalam masyarakat, baik itu tokoh sosial hingga ke tokoh agama seperti ulama. Ulama sendiri telah lama tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan politik bangsa di Indonesia. Walaupun sampai saat ini terdapat pertentangan terkait ulama dalam pusran dunia politik. Kelompok pertama meyakini bahwa ulama juga masyarakat umum yang memiliki hak dan ambisi politik, seperti halnya warga negara lainnya, sedangkan kelompok kedua mengkritik keras anggapan bahwa keikutsertaan ulama dalam politik akan membawa kerugian yang lebih besar berdasarkan anggapan bahwa Politik akan merongrong otoritas ulama.⁴ Ulama yang dahulu sangat dipercaya dalam hal keagamaan lebih banyak kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Ulama yang terletak di dalam pesantren yang terletak pula di desa-desa, menjadikan hubungan ulama dengan masyarakat sudah

³ Ulzikri& Indrajat," Budaya Politik Warga NU Kota Bandar Lampung dalam Pemilu Tahun 2019", *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 2021:4-5

⁴ Ginanjar, dkk,"Ulama dalam Politik Pemilu pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3)2021: 854

terbentuk erat sejak zaman dahulu. Sehingga ulama secara tidak langsung memiliki pengikut yang berasal dari masyarakat disekitarnya, yang dalam hal politik bilamana ulama kemudian digandengkan dengan politisi akan dapat dengan mudah memanfaatkan posisi ulama yang ada di dalam masyarakat untuk menopang kiprah sosial dan politik dari politisi tersebut.⁵ Tidak hanya dilakukan oleh politisi atau partai politik yang berbasis islam, partai-partai yang berbasis nasionalis juga menggandeng ulama-ulama sebagai sasaran dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memilihnya.⁶

Bentuk kesetiaan masyarakat terhadap ulama dalam hal ini dikarenakan ulama yang berdakwah dan membina pesantren di lingkungan masyarakat terutama di pedesaan, memiliki pembawaan nilai-nilai atau kearifan lokal yang ada. Hal tersebut berdampak pada ulama yang dapat diterima dengan mudah dan menjadikannya sebagai tokoh agama panutan bagi masyarakat. Ulama semakin mendapatkan momentum ketika Nahdlatul Ulama terbentuk. Nahdlatul Ulama pada awal terbentuk merupakan organisasi keagamaan yang melingkupi ulama-ulama tradisional dalam upaya mempertahankan paham *ahlussunnah wal jamaah* di dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam perbedaan. Gerakan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama berbasis utama pada ulama dan kemudian pesantren yang terletak di desa-desa. Sehingga awal dari pergerakan Nahdlatul Ulama terdapat pada level yang paling bawah yaitu masyarakat. Dalam perjalanannya, Nahdlatul Ulama yang merupakan *jam'iyah* atau gerakan sosial, sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar di Indonesia ini seringkali terlibat dalam gerakan politik praktis. Mulai dari

⁵ Sadi, "Kiai dan politik: Mengintip motif kiai NU (Nahdlatul Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi", *Khazanah Pendidikan*, 10(1), 2021: 2

⁶ Bairahmat, "Elite Penentu Dalam Politik Lokal", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, no. 2, 2017, hlm. 2

tujuan kebangsaan sampai pada partai politik tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan jaringan sosial Nahdlatul Ulama.⁷

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari tokoh-tokoh ulama yang termasuk pula dalam tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Abdullah, dan para Ulama pada masa saat itu. Lahirnya Nahdlatul Ulama bertujuan untuk mempertahankan dan menegakkan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* atau dapat disebut ajaran Aswaja. Ajaran ini bersumber dari kitab suci Al-qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al- Qur'an dan Hadits).⁸ Nahdlatul Ulama didukung langsung oleh para ulama yang pada dasarnya, ulama-ulama tersebut memiliki sebuah pesantren atau lembaga pendidikan Islam sehingga keadaan pesantren juga menjadi pendukung utama dari Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan ulama dan pesantren merupakan eksponen utama pembela tradisi *ahlussunnah wal jama'ah*.⁹

Perjalanan Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi keagamaan nyatanya tidak dapat terpisahkan dari dinamika politik nasional. Kader-kader Nahdlatul Ulama yang sebagian besar merupakan ulama dan santri seringkali terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti keikutsertaan dalam partai politik.¹⁰ Nahdlatul Ulama kemudian menjadi wadah yang dalam setiap aktivitas politiknya merupakan representasi atas kiprah politik para ulama di dalam dunia politik. Organisasi Nahdlatul Ulama yang berasal dari ulama dan kaum santri sering dianggap tradisional mengalami sebuah pergesaran yang drastis yang akhirnya membawa Nahdlatul Ulama berkiprah secara kongkrit dalam kehidupan berbangsa

⁷ Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama", *Addin*, 9(2), 2015:338

⁸ Irawan, H., & Selvia, I. "FANATISME DAN EKSISTENSI NILAI-NILAI DEMOKRASI KADER NAHDLATUL ULAMA KOTA METRO PADA PILPRES 2019". *PRANATA HUKUM*, 15(1), 2020: 86

⁹ Asy'ari, "Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama." *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 2016:49.

¹⁰ Mustaqim, "Politik Kebangsaan Kaum Santri: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama", *Addin*, 9(2), 2015.

dan berbegara khususnya dalam bidang keagamaan, budaya, dan politik. Perkembangan zaman menjadikan banyak ulama yang menempuh pendidikan tinggi kemudian memberikan sebuah transformasi dalam menerima perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai tradisionalnya.¹¹ Nahdlatul Ulama sendiri pada tahun 1950-an sempat menjadi partai politik. Nahdlatul Ulama yang menjadikan ulama sebagai penyanggah utama dan pesantren sebagai basisnya memiliki kekuatan yang cukup besar dalam masa tersebut dan berhasil meraih posisi 4 (empat) besar kala itu. Setelah kembali ke khittah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi masyarakat kembali dengan penerapan politik yang disesuaikan dengan tuntunan dari para ulama. Dalam muktamar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tahun 1984 diputuskan pula pedoman bagi warga Nahdliyin yaitu sebutan bagi warga penganut Nahdlatul Ulama dalam berpolitik. Setidaknya dalam pedoman tersebut, menekankan nilai kebersamaan antar masyarakat Nahdlatul Ulama untuk dapat mewujudkan demokratis di Indonesia.

Walaupun Nahdlatul Ulama tidak lagi menjadi sebuah partai politik, sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia, Nahdlatul Ulama masih memiliki pengaruh dan peranan yang besar dalam dunia politik. Hal ini mengingat Nahdlatul Ulama yang berbasis pada ulama ini masih secara intensif membahas masalah politik dalam masalah agama tematik meliputi masalah bernegara, demokratisasi, demokrasi, demonstrasi, HAM, dan reksadana dalam berbagai kegiatannya seperti Musyawarah Nasional NU dan kegiatan perkumpulan harian warga Nahdlatul Ulama. Ulama NU dalam hal ini dapat dikatakan masih cukup progresif dalam merespon masalah politik kemasyarakatan.¹²

Peranan ulama terutama peranan dari ulama Nahdlatul Ulama sendiri baik dalam sebuah kontestasi pemilihan baik legislatif, eksekutif, dan pemilihan kepala daerah memiliki peran yang cukup besar. Sebagai tokoh

¹¹ Muhammad, *Dinamika pemikiran dan gerakan politik nahdlatul ulama. (KALAM, 2015), h. 61*

¹² *Ibid, h. 62*

agama yang disegani oleh sebagian besar masyarakat, ulama menjadi sosok yang dijadikan panutan terutama bagi pemeluk agama Islam. Tidak hanya dalam urusan agama saja, ulama kemudian merambah menjadi sosok yang memiliki peranan penting dalam bidang sosial masyarakat. Ulama dalam Nahdlatul Ulama sendiri memiliki basis masyarakat Nahdliyin yang setia pada ulamannya. Masyarakat Nahdliyin terkenal akan ketaatannya dan kesetiaannya kepada ulama, baik itu dalam tingkatan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Tidak mengherankan jika di kemudian hari terdapat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seperti pemilihan Bupati, ulama Nahdlatul Ulama memiliki peranan yang cukup besar dalam kontestasi tersebut. Ulama yang ada di sekitar masyarakat memiliki sebuah pengaruh yang kuat dalam masyarakat khususnya di tingkat desa. Dalam hal ini, Ulama memiliki sebuah karismatik bagi masyarakat baik lewat tutur katanya maupun tindakan dari ulama tersebut. Kharisma yang ada di dalam ulama didapatkan dalam dua dimensi seperti yang diungkapkan oleh Nurfaizin yang mengutip dari Rozaki, yaitu yang pertama kharisma yang diperoleh secara *given*, seperti adanya ikatan genealogis dengan kiai kharismatik sebelumnya, tubuh yang besar serta suara yang keras. Dan yang kedua yaitu melalui proses perekayasaan yang dalam hal ini memiliki arti kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai moralitas dan kepribadian yang shaleh, dan kesetiaan untuk berbagi kepada sesama.¹³ Warga NU di kalangan pondok pesantren lebih mengikuti pada patronasi ketokohan tertentu. Jika kalangan Pondok Pesantren biasanya mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan kiaiinya. Jika dimasyarakat mereka akan mengikuti salah satu tokoh yang berpengaruh seperti kiai kampung, inilah yang kemudian kiai disebut sebagai elite lokal¹⁴

¹³ Faizin, N. (2017). nahdlatul ulama (nu) dalam dinamika politik lokal: Studi Kasus pada Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), 51-82.

¹⁴ Ulzikri, A. R., Cahyadi, R., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga NU Kota Bandar Lampung dalam Pemilu Tahun 2019. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 1-16.

Dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden tahun 2019 faktanya begitu jelas, bahwa telah terjadi fenomena politisasi ulama, dimana masing-masing kubu banyak menggunakan istilah dan melegitimasi peran ulama sebagai magnet politik guna mendapatkan lebih banyak perhatian dan simpatisan di Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ini. Petinggi PBNU, KH. Ma'rif Amin berpartisipasi aktif sebagai calon Wapres dari Ir. Joko Widodo sebagai pasangan nomor urut 1. Sementara pasangan nomor urut dua yaitu H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga mendung-dengungkan ulama dari kubunya melalui penggunaan istilah dukungan *ijtima'* ulama.¹⁵ Selain dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 tersebut, sudah sejak lama yaitu pada saat pemilihan bupati di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 dan 2013. Tahun 2008, pasangan Mardjoko dan Husein mendekati tokoh elite Nahdlatul Ulama di kabupaten Banyumas, yang pada hasilnya pasangan tersebut dapat memenangkan kontestasi pemilihan Bupati pada tahun 2008. Pasangan tersebut diketahui bukan merupakan orang Nahdliyin ataupun Muhammadiyah, namun pasangan tersebut dapat menarik hati masyarakat Banyumas yang mayoritas merupakan warga Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan kepada elite Nahdlatul Ulama yang melingkupi ulama-ulama di Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tahun 2013, Husein yang dulunya merupakan wakil bupati kemudian maju untuk menjadi Bupati Banyumas. Husein sendiri menjadi rival dari Mardjoko, walaupun demikian Husein tetap menggunakan pendekatannya kepada elite NU yaitu kepada Dewan Pembina NU yaitu Kyai Sobri dan Ketua PCNU kabupaten Banyumas yaitu Gus Hasan¹⁶. Husein diusung oleh partai banteng merah yaitu PDIP yang merupakan partai nasionalis.

¹⁵ Huda, M., & Dayat, M. Politisasi Ulama Pada Pilpres 2019 Perspektif Kyai Silo Di Kabupaten Pasuruan. *Kabilah: Journal of Social Community*, hl. 49.

¹⁶ Febrina, R. H., Mustika, B. U., & Dedeas, A. R, "Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 2014:102-103.

Melihat peran dan relasi elite Nahdlatul Ulama dengan partai politik dalam dua kontestasi pemilihan pemimpin di Indonesia, memperlihatkan bahwa NU berperan besar dalam kemenangan pemilu. Elit dan akar rumput NU saling menopang kepentingan dalam proses pemilihan kepala negara dan juga di tingkat daerah. Kemenangan Husein sama sekali tidak terkait mitos bahwa NU setia dengan PKB, atau PKB adalah NU. Mitos bahwa apapun partai yang menjadi kendaraan, selagi kepentingan NU turut dibawa maka organisasi ini akan setia menemani dan membantu, sudah terpatahkan¹⁷. Kemenangan pasangan Jokowi dan Ma'aruf Amin didukung pula dengan dukungan partai besar di Indonesia yaitu PDIP dan Golongan Karya. Joko Widodo yang dipasangkan dengan Ma'aruf Amin yang merupakan ulama tersohor dan memegang jabatan penting dalam Nahdlatul Ulama menjadikan daya tarik yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia terutama warga nahdliyin untuk mendukung kembali Joko Widodo. Bagi Husein yang didukung oleh PDIP merupakan bentuk dukungan yang mana PDIP mendapatkan tren kemenangan di daerah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai kantong suara terbesarnya. Tak bisa pula diabaikan ekspansi para kader NU membentuk sayap Islamis ke beberapa partai politik nasionalis.

Kekuatan NU juga terlihat dari sisi keorganisasian yang cukup kuat, mengakar sampai level yang paling bawah. Struktur organisasi NU dari mulai lembaga, lajnah dan badan otonom memiliki tugas dan fungsi yang mencakup seluruh aspek kebutuhan dan kehidupan, menyangkut kesejahteraan warga nahdliyin. Organisasi yang kuat dari hulu, cabang, hingga ranting yang mengakar menjadi bagian dari modal utama dalam kontestasi politik. Disinilah kemudian modal sebagai kekuatan itu bekerja. Jaringan NU yang kuat dan masif, didukung oleh ulama/kyai sebagai aktor besar, adalah modal utama untuk mengkonstruksi pengaruh, untuk tidak mengatakan dominasi ulama atau kyai terhadap nahdliyin. Pengaruh itu berproses dan mengakar kuat, mulai dari pesantren hingga ke sumsum

¹⁷ *Ibid. hal-104*

struktur sosial terkecil di dalam lingkup masyarakat yaitu keluarga. Ulama atau Kyai NU mempunyai modal budaya yang kuat entah dalam bentuk kehadiran yang kharismatik, personal, yang kemudian menjadi 'mitos' dan standar bagi nahdliyin untuk bertindak. Ulama atau Kyai NU menjadi simbolisasi yang sakral, diperkuat pula oleh budaya yang mendarah daging bahwa tak ada alasan untuk berpaling dari ulama atau kyai. Tidak berlebihan jika ada ungkapan ulama atau kyai adalah 'wakil' Allah SWT sepeninggal Nabi. Tindakan warga nahdliyin diarahkan pada makna tindakan terhadap reaksi orang lain atau perilaku orang lain, yaitu ulama atau kyai yang dijadikan sebagai suri tauladan. Partai politik dan aktor demokrasi yang berkepentingan tidak bisa menafikan peran mereka sebagai kunci yang harus dipegang atau bahkan 'dijinakkan' jika ingin menang bertarung di kontestasi pemilihan pemimpin daerah ataupun pusat. NU dengan para tokohnya memperlihatkan bahwa NU memiliki modal jaringan atau koneksi, yang tak bisa dinilai sebelah mata. Modal sosial ini tak bisa diraba namun dapat dirasakan ketika pertarungan terjadi, strategi kemenangan pun tak bisa dilepaskan dari pengelolaan modal ini.¹⁸

Dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, peranan ulama dalam kontestasi tersebut memiliki kontribusi dalam mengarahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin kabupaten Purbalingga di 5 (lima) tahun kedepannya. Baik dari ulama yang memiliki peranan secara langsung dalam dunia politik ataupun tidak langsung, ulama tetap menjadi sekelompok tokoh yang memiliki peran dalam kontestasi pemilihan Bupati Purbalingga tahun 2020. Dalam dunia politik, ulama kerap kali menjadi sosok yang tidak luput untuk dilibatkan dalam ajang pemilihan baik dalam pemilihan legislatif, eksekutif, dan pemilihan kepala daerah. Pengaruh dan peranan yang besar di dalam masyarakat, menjadikan para politisi menggaet ulama untuk meraup suara masyarakat. Sebagai salah satu contoh, ialah ulama yang berasal Nahdlatul Ulama .

¹⁸ *Ibid. Hal109-110*

Peranan Ulama terutama ulama Nahdlatul Ulama dalam kontestasi pemilihan pemimpin dapat terlihat dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020. Penyelenggaraan pemilihan bupati Purbalingga di selenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan menyandingkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga untuk masa kerja 2021-2025. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga nomor urut 1 yaitu Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim Supriyanto, dan nomor urut dua yang merupakan dari pihak petahana yaitu Dyah Hayuning Pratiwi dengan wakilnya yaitu Sudono.

Pasangan Calon Bupati Purbalingga nomor urut 1 yaitu Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim diusung oleh partai politik PKB, PPP, Nasdem, Demokrat, dan partai Gerindra. Sementara, pasangan calon bupati petahana di dukung oleh partai PDIP, Golkar, PKS, dan PAN. Apabila melihat partai pengusung, pasangan calon nomor urut 1 didukung oleh partai struktural dari Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selain itu melihat dari silsilah keluarga, pasangan calon bupati nomor urut 1, Muhammad Sulhan Fauzi merupakan anak dari salah satu tokoh NU di Kabupaten Purbalingga yaitu K.H. Muhsin Ahmad Djuweni yang memiliki rekam jejak dakwah dan politik di Nahdlatul Ulama sejak lama dan ibunya yaitu Umi Chamdiyatun yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purbalingga diusung oleh Partai NU periode 1971-1973. Sementara wakilnya yaitu Zaini Makarim merupakan adik dari Siti Atiqoh yang merupakan istri dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.¹⁹

Sementara pasangan calon petahana, yaitu Dyah Hayuning Pratiwi yang merupakan bupati Purbalingga di periode sebelumnya, di dukung oleh partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar. Selain itu, Dyah Hayuning Pratiwi merupakan anak kandung dari mantan Bupati

¹⁹ Nurdiansyah, M. (2021). Komunikasi Politik Patronase NU Dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 85-95.

Purbalingga yaitu Triyono Budi Sasongko yang menjabat dari tahun 2005-2015. Dyah Hayuning Pratiwi yang sebelumnya menjadi Bupati Purbalingga, merupakan wakil bupati Purbalingga yang berpasangan dengan Tasdi. Namun dikarenakan Mantan Bupati Tasdi tersandung kasus suap, mengantarkan Dyah Hayuning Pratiwi menjadi Bupati Purbalingga merampungkan masa periode Tasdi.

Pasangan Muhammad Sulhan Fauzi dan Zaini Makarim menggunakan pendekatan langsung kepada warga nahdliyin di Kabupaten Purbalingga. Pasangan nomor urut 1 tersebut, melakukan safari politik ke setiap ranting Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga. Dalam postingan instagram milik pasangan tersebut dengan username (@masojifoundation) semasa kampanye lebih banyak berinteraksi dengan warga nahdliyin di setiap desa. Pasangan tersebut mengunjungi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama sebagai upaya mereka dekat dengan warga nahdliyin di Kabupaten Purbalingga sehingga mendapat simpati karena turut serta dalam kegiatan Nahdlatul Ulama. Postingan dalam instagram pasangan tersebut, juga banyak menggunakan kalimat-kalimat nasihat agama terutama islam. Sebagai cucu dari Almarhum Kyai Hisyam Abdul Karim yang mendirikan pondok pesantren pertama di Purbalingga, Zaini Makarim melakukan pendekatan kepada tokoh agama yang berafiliasi dengan pondok pesantren kakeknya. Pasangan nomor urut 1 ini lebih sering melakukan pendekatan kepada warga nahdliyin sebagai upaya menarik dan meraih suara mereka untuk kemenangan dalam pemilihan Bupati Purbalingga tahun 2020.

Pasangan Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono yang merupakan pasangan petahana yang mana di dukung oleh partai-partai nasionalis, yang mana salah satunya yaitu PDIP yang tengah meraih tren kemenangan dalam pemilihan di provinsi Jawa Tengah. Sebagai bupati di periode sebelumnya, tentunya Dyah Hayuning Pratiwi telah memiliki penilaian tersendiri oleh rakyat Purbalingga selama masa kepemimpinannya. Pasangan nomor urut 2 ini bukan berasal dari kalangan nahdliyin, namun

memiliki relasi yang cukup kuat dengan elite Nahdlatul Ulama. Dalam kegiatan safari politik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, tidak hanya terpaku pada meraih masa pada satu golongan, melainkan kepada beberapa golongan dalam masyarakat. Pasangan nomor urut 2 dalam postingan instagramnya dengan username (@butiwi_) memperlihatkan tanggapan dari masyarakat secara umum, dan juga terdapat dari beberapa tokoh agama baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Ulama-ulama yang memberikan tanggapan terkait pasangan nomor urut 2 ini merupakan kyai yang tersohor di Purbalingga dan memiliki pondok pesantren yang besar. Pendekatan yang dilakukan oleh Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono menekankan kepada masyarakat luas yang kemudian didukung oleh kedekatannya dengan ulama atau kyai di kabupaten Purbalingga. Dimana kyai atau ulama yang mendukung pasangan nomor urut 2 merupakan kyai tersohor yang memiliki banyak santri. “Santri manut Kyai” masih bisa dirasakan dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Purbalingga.

Kedua pasangan calon bupati Purbalingga tersebut memiliki modal sosial yang besar dan berbeda. Walaupun pasangan calon nomor 1 memiliki basis dukungan dari partai Nahdlatul Ulama, namun tidak dapat meraih kemenangan. Hal ini dikarenakan ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi dua kubu dalam mendukung kontestasi pemilihan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020. Ulama Nahdlatul Ulama baik secara terang-terang ataupun tidak telah menunjukkan keberpihakkannya dalam memilih salah satu calon Bupati Purbalingga di tahun 2020. Melewati berbagai kegiatan yang diselenggarakan, ulama Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga menempatkan kepentingan tertentu dalam kegiatan yang diselenggarakan. Lewat kegiatan tersebut, ulama berusaha mempengaruhi masyarakat atau para pengikutnya untuk memilih apa yang dipilih mereka.²⁰ Hal inilah

²⁰ Asep Jahidin, “Pertarungan Ulama di Pilpres 2019”, www.m.detik.com, diakses 23 Februari 2020.

yang menjadikan para politisi dengan cermat menggaet ulama-ulama yang berpengaruh besar di kalangan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, ulama yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama memiliki beragam peran disertai motif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tak terkecuali di Kabupaten Purbalingga yang memiliki warga Nahdliyin yang cukup besar. Pengaruh Ulama Nahdlatul Ulama yang memiliki peranan yang cukup berpengaruh dalam kontesatasi pemilihan kepala daerah, menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk mengambil topik tersebut dengan mengambil judul “Peran Ulama kalangan Nahdlatul Ulama dalam Kontestasi Pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga tahun 2020”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka terdapat sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran posisi ulama dari Kalangan Nahdlatul Ulama dalam kontestasi Pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 pada setiap pasangan calon Bupati?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa peran posisi dari Ulama kalangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga dalam proses kontestasi Pemilihan Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020 pada setiap pasangan calon Bupati Purbalingga.

2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadikan Ulama kalangan Nahdlatul ulama di Kabupaten Purbalingga ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Akademis

Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu Pemerintahan, khususnya konsentrasi Kekuatan Politik Intermediary/Penghubung berkaitan dengan Peran Ulama dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan sejenisnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan ulama Nahdlatul Ulama dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Sudah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik ulama dan politik, diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mikail Diponegoro mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Penulis mengangkat judul Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Ahmad Mikail Diponegoro menggambarkan peran dan juga faktor dari Ulama NU di Kabupaten Ponorogo dalam mendukung dan memenangkan Ipong Muchlissoni dalam Pilkada Ponorogo tahun 2015. Dengan menggunakan teori perilaku pemilih dan pilihan rasional, didapatkan bahwa Dewan Syariah dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama

Kabupaten Ponorogo berhasil dalam mempengaruhi dan meyakinkan para pemilih di Kabupaten Ponorogo yang sebagian besar merupakan seorang *nahdliyin* untuk memilih Ipong Muchlissoni sebagai Bupati Ponorogo selanjutnya.

Kemudian terdapat penelitian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Denis Ariyanti dengan mengangkat judul Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa Losari Kecamatan Amplegading Kabupaten Pematang. Dengan menggunakan teori partisipasi politik, Denis Ariyanti menganalisis bentuk serta faktor dari Kyai Nahdlatul Ulama di Desa Losari turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Hasil dari penelitian tersebut ialah terdapat partisipasi dari kyai Nahdlatul Ulama berupa pengambilan keputusan diwujudkan dalam bentuk motivasi, nasihat, dan netralitas dalam pemilihan kepala desa dimana warga yang awam akan pilkades diberikan nasihat, motifasi serta pendidikan politik yang disalurkan melalui tokoh pegawai kantor kepala desa, panitia pemilihan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya pada tahun 2020, penelitian yang mengangkat topik ulama kalangan Nahdlatul Ulama dengan politik terutama dalam kontestasi politik adalah penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Mansyur. Beliau mengambil penelitian mengenai Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2029 perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Menggunakan teori hukum demokrasi dan partisipasi politik, penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang mana Peran ulama pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga: pertama, ulama yang terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. Kedua, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. Ketiga, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara fulgar atau terang-terangan.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dicantumkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Ulama atau kyai masih memiliki daya tarik yang cukup besar bagi elite politik maupun masyarakat. Kedekatan para elite politik kepada kaum ulama atau kyai terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama tentu dapat menguntungkan bagi kedua pihak. Ulama atau kyai dari kalangan Nahdlatul Ulama memiliki karisma yang menjadikannya lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama menempatkan ulama atau kyai sebagai tokoh teladan baik dalam hal keagamaan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan menggunakan teori perilaku politik yang menekankan pada bagaimana interaksi dari elite politik dengan ulama atau kyai kemudian ke masyarakat, hubungan dari ketiga aktor tersebut dalam masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Purbalingga tahun 2020. Kemudian dengan menggunakan teori elite agama untuk menguatkan teori perilaku politik yang mana interaksi dari ulama atau kyai Nahdlatul Ulama, sebagai sebuah elite agama memiliki kekuatan yang berbeda dari masyarakat itu sendiri.

Dalam menganalisa dan menjawab pertanyaan akan masalah yang penulis teliti, penulis menggunakan teori pendukung penelitian yaitu, teori perilaku politik dan teori elite. Pada teori perilaku politik, peneliti menggunakan pandangan Ramlan Surbakti, untuk membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor dan perilaku pemilih. Sementara untuk teori elite, peneliti menggunakan pandangan dari Vifredo Pareto dan Robert Putnam.

1.5.1. Teori Perilaku Politik

Teori mengenai perilaku politik tidak hanya bertumpu pada perilaku dan kegiatan dari manusia, tidak hanya mempelajari faktor pribadi, namun juga terdapat faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis,

dan psikologis²¹. Menurut Ramlan Surbakti, perilaku politik dapat didefinisikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik²².

Perilaku politik dibagi menurut Ramlan Surbakti dibagi mejadi dua. Yang pertama ialah perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah. Perilaku politik ini memiliki tanggung jawab dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Kedua, perilaku politik dari warga negara biasa, baik individu maupun kelompok. Perilaku politik yang kedua tidak memiliki kewenangan seperti yang pertama, tapi memiliki dan berhak mempengaruhi pihak pertama dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini mengingat, tugas dari kelompok pertama terdapat sangkut pautnya dengan kehidupan dari kelompok kedua²³.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dari aktor politik, menurut Ramlan Surbakti²⁴, yaitu yang pertama ialah lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Kedua yakni faktor lingkungan sosial politik secara langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor. Seorang aktor politik mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya, hal ini dapat terjadi pada lingkungan aktor mulai dari yang terdekat seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.

Faktor yang ketiga adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat tiga basis fungsional sikap untuk dapat memahami struktur kepribadian, yaitu penyesuaian diri, eksternalisasi

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 75

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007) hlm. 15

²³ *Ibid*, hlm. 16.

²⁴ *Ibid*, hlm. 132-133

dan pertahanan diri. Faktor yang ketiga ditentukan dan dipengaruhi oleh minat dan kebutuhan, keinginan untuk sesuai dan selaras, dan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis. Keempat yakni faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Hal ini dipengaruhi seperti keadaan cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Untuk mendukung teori perilaku politik, dan untuk mempertajam analisa dari perilaku politik masyarakat, maka peneliti menggunakan teori perilaku pemilih sebagai teori pendukung. Dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, Ramlan Surbakti menjelaskan faktor-faktor Perilaku Pemilih berdasarkan pada pandangan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional²⁵. Adapaun penjabaran lebih lanjut mengenai faktor-faktor perilaku pemilih, sebagai berikut :

- 1) Pertama, melalui pendekatan struktural dimana kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber dari kemajemukan politik, seperti kelas sosial, agama, perbedaan kota dan desa, bahasa, dan nasionalisme.
- 2) Pendekatan yang kedua secara sosiologis, perilaku pemilih dipengaruhi akan latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.
- 3) Ketiga, pendekatan ekologi yang menekankan pada perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan

²⁵ Ibid, hlm. 145-146

profesi tertentu yang bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang terjadi dalam unit teritorial tersebut dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

- 4) Pendekatan yang keempat, pendekatan psikologi sosial yang mana konsep ini sama seperti perilaku politik. Terdapat proses identifikasi yang dilakukan pemilih untuk dapat mempengaruhi perilakunya, terdapat keterikatan emosional yang dirasakan oleh pemilih terhadap hal yang diinginkannya. Sehingga pemilih akan memilihnya tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.
- 5) Dan yang kelima adalah pendekatan pilihan rasional, dimana pemilih dalam kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pemilih mempertimbangkan suaranya apakah dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, dengan bertindak akan menggunakan hak pilihnya atau tidak terhadap pilihannya.

Untuk melaksanakan penelitian dan menganalisa hasil penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan secara psikologis untuk menganalisa bagaimana faktor-faktor yang menjadikan ulama atau kyai nahdlatul ulama turut berperan selama masa kontestasi pemilihan Bupati Purbalingga tahun 2020. Selain itu, dengan dua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa perilaku memilih dari sudut masyarakat di wilayah kabupaten Purbalingga dan dari tim pemenang masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Pendekatan secara sosiologis menkankan pada latar belakang demografi dan sosial terutama wilayah atau lingkungan tempat tinggal dan agama yang dianut. Dalam penelitian dilakukan pada lingkungan masyarakat di desa-desa yang ada di Kabupaten Purbalingga, yang mana terdapat pondok pesantren dan sebagian besar masyarakatnya merupakan warga beragama Islam dan menganut paham *ahlussunnah wal jamaah an-Nahdliyah*.

Keberadaan kyai atau ulama yang ada di dalam pondok pesantren, serta hubungan yang dibangun dengan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan pendekatan psikologis untuk memahami faktor-faktor dari perilaku memilih. Bagaimana ulama atau kyai menempatkan dukungannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga pada tahun 2020, terhadap keinginan pribadi ataupun dikarenakan alasan-alasan kemasalahan umat atau masyarakat bersama.

1.5.2. Teori Elite

Teori elite akan selalu dihubungkan dengan kehidupan politik kenegaraan atau mengenai secara langsung posisi soail seseorang, baik di dalam lingkup keagamaan maupun profesi lainnya²⁶. Elite merupakan posisi yang ada di dalam masyarakat yang berada di puncak kekuasaan, baik organisasi sosial, politik, ekonomi maupun keagamaan atau memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau struktur sosial terpenting, yaitu posisi teratas dalam organisasi tersebut²⁷.

Menurut Pareto, pengertian elite yakni dalam setiap setiap masyarakat akan diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi masyarakatterhadap kekuasaan sosial politik yang penuh. Sekelompok elite menurut Pareto, ialah mereka yang mampu menjangkau pusat kekuasaan, dan mampu menduduki jabatan tinggi yang ada dalam masyarakat, seperti pengacara, ilmuwan tokoh agama, mekanik atau bahkan mafia²⁸. Mosca menerangkan perbedaan elite dengan masyarakat berdasarkan karakteristiknya. Elite memiliki kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik²⁹.

²⁶ Abubakar Madani, *Konsep Elite Polirik*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) hlm.

21

²⁷ *Ibid*, hlm. 23

²⁸ Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) hlm. 28-29.

²⁹ *Ibid*, hlm. 31.

Putnam dalam melakukan analisa terkait pengaruh yang paling besar dan berkuasa dalam membuat keputusan kolektif dalam suatu masyarakat, terbagi menjadi 3 (tiga) model. Model Analisis yang pertama analisis posisi, dengan melihat elite dalam struktural organisasi, yang mampu dan paling banyak ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk masyarakat. Analisis yang kedua, analisis reputasi yang mana menempatkan elite sebagai sekelompok orang yang memiliki pengaruh atas keputusan suatu organisasi, walaupun elite tersebut tidak dalam struktur organisasi atau dalam posisi informal dalam masyarakat. Dan model analisis yang ketiga adalah analisis keputusan. Model ini menekankan penempatan elite sebagai kelompok yang berpengaruh, dengan ide-ide dan pemikirannya, dapat menjadi sumber atau preferensi untuk menentukan keputusan organisasi³⁰. Untuk lebih mendukung dalam menganalisa penelitian yang dilakukan, peneliti juga menggunakan lebih jelas mengenai elite agama.

1.5.3. Elite Agama

Salah satu elite yang ada dalam masyarakat ialah elite agama. Elite agama memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau struktur sosial terpenting, dalam hal keagamaan. Keilmuan yang dimiliki oleh para elite agama, menjadikan tokoh-tokoh elite agama memiliki posisi dan pengaruh penting di dalam kehidupan masyarakat. Elite Agama menunjuk pada keterlibatan ulama atau kyai yang merupakan tokoh agama, pemuka agama, dan sebagian besar memiliki lembaga pendidikan pesantren atau madrasah³¹

Dalam sejarah Indonesia, elite agama memiliki peran yang penting sama halnya dengan elite politik. Tidak jarang elite agama terlibat langsung dalam mendirikan dan ikut bergabung dalam Partai Politik,

³⁰ Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrrewas, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 80

³¹ Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) hlm. 15-16.

baik partai politik nasionalis ataupun yang berhaluan agama³². Secara politik, menurut Abdul Chalik yang mengutip hasil penelitian dari Endang Turmudi, kyai memiliki posisi yang kuat salah satunya dikarenakan kyai merupakan orang yang berpengetahuan luas sehingga penduduk belajar akan pengetahuan kepada sosok kyai. Pengetahuan yang luas yang kyai miliki menyebabkan sang kyai selalu mempunyai pengikut baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramah-ceramah, maupun santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya³³.

Menurut Ichwan Arifin dalam penelitiannya mengenai perilaku politik kyai, menerangkan bahwa kedudukan kyai yang istimewa menjadi sebuah kekuatan yang dapat dipergunakan secara optimal dalam politik. Keilmuan dan pemahaman akan keagamaan yang dimiliki para kyai, menurut beliau menjadikan masyarakat berasumsi bahwa kyai dalam politik dapat membantu ‘membersihkan’ citra politik yang kotor, sehingga hasil-hasil dari proses politik dapat memberikan kemanfaatan bagi umat secara lebih baik³⁴. Sementara menurut Farid, kyai yang merupakan salah satu elite agama memiliki kekuatan atau kekuasaan yang dapat berimplikasi besar terhadap keputusan politik. Sebagai elite agama yang ada di tengah kehidupan masyarakat, elite agama memiliki kekuasaan dalam bentuk pengaruh yang cukup besar di dalam masyarakat. Menjadikan sosok elite agama berbeda dan istimewa jika dibandingkan dengan elite lainnya³⁵.

Dengan demikian, elite agama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat ataupun di dalam dunia politik. Elite agama dalam ini yakni ulama atau kyai memiliki kekuatan yang

³² Ibid, hlm. 52

³³ Ibid, hlm. 53-54.

³⁴ Ichwan Arifin, Tesis, “Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II Semarang”, (Semarang: UNDIP, 2008), Hal. 31

³⁵ Farid, “Dinamika Interaksi antara Elite Politik Lokal dan Elite Agama dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019 di Kota Pasuruan”, 2020, Jurnal Politik Indonesia 6(1), hal. 7

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Melalui ucapan, tindakan, ataupun sikap yang ditampilkan oleh sosok ulama atau kyai tersebut, dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Keilmuan dan wawasan yang dimiliki oleh sosok ulama atau kyai tersebut, menjadikan sosoknya diutamakan dalam masyarakat. Tidak hanya dalam urusan keagamaan, urusan dalam bidang sosial maupun politik, ulama atau kyai turut berpartisipasi atau berperan di dalamnya. Interaksi yang tercipta antara ulama atau kyai dengan masyarakat menimbulkan kedekatan hubungan antara ulama atau kyai dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempercayai sosok kyai atau ulama untuk dapat mengarahkan kehidupan dalam masyarakat dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ulama atau kyai.

Memiliki pengaruh yang besar, menjadi kekuatan yang dimiliki oleh ulama atau kyai. Hal ini menjadikan para politisi ‘memanfaatkan’ sosok para ulama atau kyai untuk menjadi bagian atau dapat dekat dengannya. Para politisi terutama pada era kontestasi politik terselenggara, berupaya menggunakan kekuatan ulama atau kyai untuk menggaet suara masyarakat. Dapat dikatakan, ulama atau kyai yang memiliki pengaruh besar tersebut, menjadi *vote getter* atau penarik suara bagi masyarakat untuk memilih salah satu peserta kontestasi politik. *Vote Getter* sendiri memiliki arti orang yang dapat memikat hati pemilih. Pengetahuan yang dimiliki oleh sosok ulama atau kyai, hubungan yang erat antara ulama atau kyai dengan masyarakat di sekitarnya, serta sosok karismatik dari ulama atau kyai, dapat memikat hati masyarakat dalam penentuan sebuah keputusan. Tidak diragukan lagi bahwa, ulama atau kyai di dalam sebuah kehidupan masyarakat, memiliki posisi yang cukup tinggi dan sering dijadikan sebagai teladan serta panutan bagi masyarakatnya. Sehingga, sosok ulama atau kyai mampu menjadi *vote getter* atau penarik suara para pemilih dengan arahan atau petunjuk

yang diberikan ulama atau kyai tersebut pada masa kontestasi politik terjadi.

Dengan menggunakan teori perilaku politik yang menekankan pada pendekatan secara sosiologis dan psikologis, sosok ulama atau kyai dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat dapat mempercayai dengan adanya ulama atau kyai di sekitarnya dapat mengarahkan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik. Memiliki latar belakang yang sama seperti agama serta ajaran yang sama menjadikan hubungan antara ulama atau kyai dengan masyarakat semakin dekat. Didukung dengan teori elite yang menguatkan posisi ulama atau kyai dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi salah satu bagian elite yang istimewa karena ulama atau kyai mampu untuk menjadi kelompok yang memiliki peran serta partisipasi dalam berbagai bidang di dalam kehidupan masyarakat. Sosok ulama atau kyai menjadi tokoh yang berperan penting di dalam masyarakat. Karena pembawaan dalam dirinya, keilmuan dan wawasannya, serta reputasi yang dibangun dengan baik oleh ulama atau kyai tersebut, masyarakat dapat percaya dan menjadikan sosok ulama atau kyai tersebut sebagai panutan, dapat menjadi teladan baik dalam berucap, bersikap, maupun bertindak. Tidak heran kemudian, kelebihan yang dimiliki oleh sang ulama atau kyai, 'dimanfaatkan' oleh politisi untuk mendulang suara. Kedekatan yang dimunculkan oleh para politisi dengan tokoh elite agama seperti ulama atau kyai, diharapkan dapat menarik suara masyarakat sebagai pemilih, dapat memperbaiki dan meningkatkan citra dari para politisi dengan hubungan yang dekat dengan ulama atau kyai. Ulama atau kyai yang dekat dengan masyarakat, maka masyarakat juga merasa dekat dengan ulama atau kyai tersebut. Sikap atau ucapan dari para ulama atau kyai kerap kali menjadi acuan ataupun menjadi salah satu alasan, dari masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Hal ini juga dapat terjadi dalam

kontestasi politik, dimana apabila ulama atau kyai tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung melakukan atau menyatakan dukungan kepada salah satu politisi, atau peserta kontestasi politik, masyarakat yang ada di sekitar lingkungan ulama atau kyai tersebut, dapat menjadikan sosok pilihan ulama atau kyai tersebut menjadi pilihannya ataupun dapat melakukan pencertamatan terhadap ucapan ataupun sikap yang ditampilkan oleh sang ulama atau kyai. Para politisi ataupun para peserta kontestasi politik menggunakan hal tersebut dengan menggandeng ulama atau kyai, memiliki hubungan yang erat, dengan tujuan salah satunya ialah mampu menarik suara pemilih yakni rakyat untuk dapat memilihnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1. Perilaku Politik

Perilaku politik adalah interaksi yang tercipta antar dua aktor atau lebih yang tercipta disebabkan oleh beberapa faktor terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan penegakkan dari keputusan bersama di dalam masyarakat ataupun keputusan politik. Perilaku politik dapat dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan, tempat individu hidup dalam bermasyarakat.

2. Elite

Elite merupakan sekelompok kecil orang di dalam kehidupan masyarakat yang sangat luas, menjadi kelompok atau sosok yang memiliki pengaruh ataupun reputasi yang penting di dalam masyarakat berdasarkan suatu hal yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang tersebut, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan masyarakat.

3. Elite Agama

Elite agama termasuk dalam dalam kelompok elite, yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang keagamaan. Salah satu elite agama yang ada yakni ulama atau kyai. Ulama memiliki arti adalah orang yang

ahli dalam hal atau pengetahuan mengenai agama islam³⁶. Ulama merupakan seseorang yang memiliki penguasaan akan ilmu agama islam yang diwarisi dari ajaran Nabi secara turun temurun. Ulama menguasai ilmu serta amaliyah agama Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis. Salah satu ulama atau kyai yang menerapkan ajaran nabi ialah ulama atau kyai yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama dengan menekankan pada ajaran *ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah*. Nahdlatul Ulama atau dapat disingkat dengan NU merupakan organisasi keagamaan yang didirikan oleh para ulama di Indonesia pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriyah di Surabaya. Pendiri NU ialah Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ary. Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah (aswaja)³⁷. Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits)³⁸ Nahdlatul Ulama menjadi sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang identik akan toleransi yang tinggi.

4. *Votte Getter*

Votte Getter atau penarik suara dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam menarik suara atau pilihan dari orang lain untuk dapat mengikuti apa yang dikehendaki oleh seorang penarik suara. Seorang penarik suara memiliki kemampuan dan memiliki karisma sehingga orang-orang dapat tertarik akan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh seorang *votte getter*.

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat kabupaten dengan tata cara pemungutan suara warga masyarakat di

³⁶ Romzi. "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama". 2012, Jurnal Studi Agamaagama, 2 hlm. 42

³⁷ Chalik. " *Nahdlatul ulama dan geopolitik: perubahan dan kesinambungan*". Impulse. Hlm. 1. 2011

³⁸ Mubin. "Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia" 2020.

dalam suatu kabupaten memilih calon Bupati pada saat pemilihan Bupati berlangsung. Pemilihan Bupati ditujukan untuk mengisi posisi Bupati di suatu Kabupaten yang telah habis masa jabat Bupati sebelumnya.

1.7. Argumen Penelitian

Peran Ulama dalam kontestasi pemilihan bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat dalam tugasnya sebagai bagian dari konsultan politik terutama dalam perencanaan program-program yang akan diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan sebagai pengarah dalam upaya menggaet suara masyarakat yang tentunya tidak meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Selain peran tersebut, ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dapat menjadi *vote getter* bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kedekatan para pasangan calon dengan ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama dapat menimbulkan nilai positif, yang mana wilayah kabupaten Purbalingga sendiri mayoritas beragama Islam. Masyarakat Islam terutama nahdliyin dapat mengikuti apa yang dari sang ulama atau kyai lakukan atau katakan. Tentu saja hal ini dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kedekatan khusus dengan ulama atau kyai dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Walaupun Nahdlatul Ulama telah tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik langsung, namun aktor-aktor yang ada dalam Nahdlatul Ulama seperti ulama atau kyai, para pemilik pondok pesantren, dituntut untuk tetap mengawal jalannya politik. Ulama atau kyai yang kemudian hadir dalam politik tidak selalu berperan sebagai aktor politik. Ada beberapa faktor yang menjadikan kyai atau ulama dari Nahdlatul Ulama di kabupaten Purbalingga turut dalam kontestasi politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Faktor yang pertama ialah agar jalannya kontestasi politik berjalan dengan aman damai sesuai ajaran agama. Ulama atau kyai dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak menginginkan jalannya kontestasi politik yang sesuai hukum yang ada, tidak bertentangan dengan

moral, dan menyinggung yang dapat menimbulkan konflik SARA. Selain itu, ulama atau kyai Nahdlatul Ulama yang turut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020, berupaya untuk terus mengawal program-program keagamaan yang sudah terlaksana dan dianggap baik untuk terus dilanjutkan bagi siapapun calon Bupati yang terpilih.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penelitian. Creswell & Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: sebuah metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dalam sebuah masalah sosial atau manusia. Proses penelitiannya melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang dikumpulkan biasanya berasal dari partisipan, analisis data dibangun secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data.³⁹

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga.

³⁹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth edit). Sage Publication, Inc.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan serta mempresentasikan orang, tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan data hasil dari wawancara dan studi literatur yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data berkaitan dengan segala hal yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dengan kata lain data tersebut diperoleh dari tangan orang pertama oleh peneliti. Data ini dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditelitinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menguatkan data primer.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam ini, tidak menggunakan struktur yang ketat dan formal, namun dengan strategi untuk menggiring pertanyaan yang makin membesar, sehingga

informasi yang dikumpulkan cukup memadai, memiliki kedalaman dan keleluasaan sehingga mampu mengorek kejujuran, tanpa memaksakan kehendak kita dalam mengajukan pertanyaan. Dalam proses wawancara ini selain panca indera peneliti yang digunakan sebagai pengumpul data, ditunjang pula dengan penggunaan alat rekam tape recorder yang telah dikemas sedemikian rupa agar tidak mengganggu proses wawancara. Untuk memperlancar jalannya wawancara digunakan petunjuk umum wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum terjun ke lapangan. Wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden di mana peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

Informan yang akan diwawancarai adalah ulama atau kyai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020. Dengan teknik *Purposive sampling*, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, peneliti memilih informan dengan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan, untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan peneliti lakukan. Adapun kriteria yang peneliti tentukan, antara lain :

- a) Ulama atau kyai berpaham *ahlusunnah wal jamah an-Nahdliyah*
- b) Pendiri dan/atau pengasuh Pondok Pesantren
- c) Aktif dalam Organisasi Nahdlatul Ulama
- d) Menjadi narasumber dalam foto dan/atau video yang di unggah dalam media sosial masing-masing pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa ulama atau kyai kalangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purbalingga, yang memenuhi kriteria, dianggap layak untuk memenuhi data yang peneliti butuhkan, dengan rincian sebagai berikut :

1) K.H. Mashudi Munir A.H.

Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran al-Mushafiyah Karanganyar-Purbalingga. Menjadi bagian dalam Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga (Syuriah merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama). Beliau termasuk dalam salah satu unggahan di media sosial pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga nomor urut 2 (dua) yang di upload pada tanggal 21 November tahun 2020.

2) K.H. Achmad Baedlowi

Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ikhsan Kertanegara-Purbalingga. Menjadi bagian dari syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Kertanegara. Unggahan pada media sosial pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga nomor urut 2 (dua) menampilkan sosok K.H. Achmad Baedlowi yang di unggah pada tanggal 8 Oktober 2020

3) K.H. Abror Musodiq

Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Bukateja-Purbalingga. Menjadi bagian dalam Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bukateja. Beliau termasuk menjadi narasumber yang ada pada unggahan media sosial pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga nomor urut 2 (dua) yang di upload pada tanggal 28 Agustus 2020.

4) K.H. Basyir Fadlulloh

Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Tholabah Bukateja-Purbalingga. Menjadi bagian dalam kepengurusan tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bukateja. Beliau ada dalam unggahan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yang di upload pada tanggal .

5) K.H. Fitron Ali Sofyan

Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren an-Nahl Kutasari-Purbalingga. Termasuk dalam bagian Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga. Beliau termasuk dalam salah satu narasumber video yang diunggah dalam media sosial pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga nomor urut 1 (satu) yang di unggah pada tanggal .

Dalam penelitian ini, terdapat informan lain dalam yaitu tim sukses atau tim pemenangan dari kedua belah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Peneliti memilih tim pememnangan yang juga memiliki latar belakang aktif dalam Nahdlatul Ulama. Pada tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 ialah bapak Nasihin yang merupakan pengurus aktif, bendahara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Karanganyar, dan menjadi bagian dari pengurus Koin NU di kabupaten Purbalingga. Sementara untuk tim pemenangan pada pasangan calon nomor urut 2, ialah bapak Anggit Aji Pangestu yang merupakan sekretaris jendral Rijalul Ansor Pimpinan Anak Cabang Karanganyar, dan anggota aktif dari Barisan Ansor Serbaguna atau biasa dikenal

sebagai Banser. Untuk melengkapi peran ulama kalangan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Bupati Purbalingga tahun 2020, peneliti mengambil sumber data dengan mewawancarai beberapa masyarakat di kabupaten Purbalingga terutama yang aktif pula dalam Nahdlatul Ulama.

Data yang diperoleh nantinya adalah berupa informasi mengenai peran-peran yang dilakukan oleh masing-masing ulama Nahdlatul Ulama dan faktor-faktor yang membuat ulama Nahdlatul Ulama di kabupaten Purbalingga turut mendukung masing-masing pasangan calon Bupati di Kabupaten Purbalingga pada penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2020.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik berasal dari buku ataupun data pada internet yang terkait dengan penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang muncul di dalam penelitian kualitatif berwujud rangkaian kata-kata, bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut dikumpulkan melalui hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, yang kemudian diproses sebelum digunakan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan model dari Miles & Huberman (2020) yang terdiri atas data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu hanya sebagian dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu dengan cara merefleksi kembali apa yang telah kembali ditemukan serta bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk memperoleh kebenaran “intersubyektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.